

PERAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DALAM PROGRAM SUBSIDI BIBIT SAPI TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

***Imanuel Jaya¹⁾**

1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstrak

Fungsi pemerintah yaitu menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan produk peternakan yang cukup baik dalam jumlah mutu, aman, bergizi, beragam dan merata. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan pada sektor peternakan sehingga kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih kepada pembangunan perekonomian bangsa. Program subsidi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu pengembangan peternakan yang diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaannya. Para petani mengalami masalah yaitu kurangnya modal. Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan peternakan serta ekonomi masyarakat, disamping meningkatkan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing masyarakat serta sebagai pengembangan komoditas unggul daerah. Berdasarkan dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi serta wawancara dengan masyarakat dan pejabat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam proses analisa data dengan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memberikan subsidi bibit sapi di Kelurahan Kalampangan dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya memang sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pemberian bantuan subsidi bibit sapi. Namun dalam hal pelaksanaannya memang masih banyak hambatan, karena itu masih di perlukan upaya untuk menghadapi berbagai hambatan tersebut guna tercapai suatu tujuan

Kata Kunci: Peran, Perekonomian Masyarakat, Subsidi Bibit Sapi

PENDAHULUAN

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan keseluruhan yang bertujuan untuk menyediakan pangan hewani berupa daging, susu, serta telur yang bernilai gizi tinggi serta berdampak pada meningkatnya pendapatan petani peternak, yang kemudian menumbuhkannya devisa dan memperluas kesempatan kerja (Setiawan,

2019). Pengembangan peternakan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Tugas serta fungsi pemerintah yaitu menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan produk peternakan yang cukup baik dalam jumlah mutu, aman, bergizi, beragam dan merata (Rhama, & Setiawan, 2020). Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan pada sektor peternakan sehingga kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih kepada pembangunan perekonomian bangsa.

Setiap usaha tentu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan usaha, baik itu yang menghambat ataupun yang mendorong. Seperti halnya penelitian yang telah dilakukan Emy Khoifah dan Harnies Marika dengan judul Peran Dinas Peternakan dan Perikanan dalam mengembangkan usaha perikanan budidaya di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso diketahui bahwa faktor-faktor penghambat budidaya yang dilakukan dalam hal ini budidaya perikanan diantaranya, yaitu :

1. Sifat produk peternakan dan perikanan yang mudah rusak;
2. Harga ternak masih sulit dikendalikan;
3. Belum berkembangnya industri mikro atau *home industry* pengolahan produk ternak dan ikan;
4. Terbatasnya info pasar yang diterima oleh pelaku usaha peternakan dan perikanan; dan
5. Rendahnya tingkat sumber daya manusia peternakan dan perikanan.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Amal yang berjudul Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barru terdapat 2 (dua) faktor penghambat dalam hasil penelitiannya, yaitu :

1. Rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal memanfaatkan teknologi perikanan yang sudah meningkat pesat; dan
2. Cuaca yang tidak menentu mengakibatkan budidaya menjadi rusak dan dapat menyebabkan kematian.

Upaya mengembangkan peternakan merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan dalam memberikan bantuan ternak sapi maupun modal kepada kelompok petani-peternak. Untuk mencapai

tujuan pembangunan peternakan perlu adanya strategi dan kebijakan dalam usaha memperkuat agribisnis ternak lokal dan bagaimana meraih peluang-peluang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya potensi ketersediaan pakan dari limbah tanaman cukup besar sepanjang tahun sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dan menjamin keberlanjutan usaha ternak, dengan adanya upaya peternakan memberikan dampak positif terhadap budidaya, ekonomi dan sosial masyarakat.

Kalimantan tengah yang saat ini hampir mencapai jumlah penduduk 2,8 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan populasi 69,69 persen per tahun (BPS Provinsi Kalimantan Tengah Bulan Juni Tahun 2019), yang merupakan target pasar potensial yang selalu menjadi target produsen pangan termasuk produk pangan peternakan. Jika dilihat dari perspektif lain Kalimantan Tengah memiliki potensi untuk menjadi daerah pengekspor peternakan, dengan luasan daerah 153 ribu km² hal tersebut sangat memungkinkan dengan adanya ketersediaan sumber daya lahan dengan berbagai jenis tanaman pakan dan keberadaan sumber daya manusia yang mendukung. Namun realitanya menunjukkan bahwa pembangunan peternakan masih belum dapat memenuhi kebutuhan, termasuk rentan terhadap penyakit.

Lemahnya struktural dan pengawasan dalam sistem pengembangan peternakan menjadi salah satu faktor. Oleh karena itu, perlu diupayakan dalam mencari model pengembangan dan kelembagaan yang tepat dan secara ekonomis menggantungkan dalam penerapannya. Dengan demikian jika sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya maka akan menghasilkan produk peternakan yang cukup, berkualitas, harga terjangkau dan mampu bersaing dengan daerah lain maupun luar negeri dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.

Sinergitas dari setiap elemen yaitu pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama sehingga pelaksanaan program menjadi optimal dalam pelaksanaannya (Amal, 2016:134). Tujuan dari adanya sinergitas adalah mempengaruhi perilaku secara individu maupun kelompok yang diantara kedua terjalin kontak, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya mengerucut kepada suatu tujuan bersama. Sama halnya dalam penelitian di Kabupaten Barru, Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai

pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Barru ini telah bersinergi dengan beberapa elemen yang ada seperti kelurahan maupun desa. Hal tersebut dapat terlihat dengan pelaksanaan program-program yang dicanangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru ini tidak bisa berjalan lancar tanpa sinergitas dari beberapa elemen yang ada.

Program subsidi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu pengembangan peternakan yang diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam program tersebut tentu tidak terlepas dari pengawasan dan peran pemerintah sehingga menghasilkan produk yang maksimal untuk mencapai tujuan dari program peternakan, yaitu mendorong peningkatan produksi, menumbuhkan wirausaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian program yang diberikan oleh pemerintah dapat sejalan terhadap target produksi ternak khususnya sapi serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani peternak serta berkelanjutan.

Pada umumnya peternakan di Kelurahan Kalampangan didominasi oleh peternakan rakyat berskala kecil dan dilakukan secara sambilan, tentunya dalam melakukan kegiatan tersebut para petani mengalami masalah yaitu kurangnya modal. Berkaitan dengan masalah tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan memiliki program subsidi bibit sapi bagi para petani sebagai salah satu cara untuk menunjang pembangunan peternakan. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan. Upaya tersebut dilakukan dengan membuka peluang investasi dan pasar sekaligus mengembangkan investasi nasional dengan meningkatkan peran swasta dalam pembangunan peternakan serta memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Peran pemerintah yaitu sebagai motivator, akselerator, regulator, fasilitator dan promotor dalam keberhasilan dari tujuan pembangunan peternakan.

Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan peternakan serta ekonomi masyarakat, disamping meningkatkan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing masyarakat serta sebagai pengembangan komoditas unggul daerah. Namun, program tersebut tentu memiliki beberapa kendala

untuk mencapai tujuan akhir, dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut. Berangkat dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait **“Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dalam Program Subsidi Bibit Sapi Terhadap Perkembangan Perekonomian Masyarakat (Studi Di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Proses dan Strategi Implementasi

Proses pemberdayaan masyarakat menurut Pranarka dan Moeljarto (1996: 56-57) mengandung 2 (dua) kecenderungan yaitu ; (1) Proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian masyarakat. Kecenderungan ini disebut dengan kecenderungan primer dari makna pemberdayaan; dan (2) Kecenderungan sekunder lebih menekankan kepada proses menstimulasi, mendorong maupun memberi motivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan tujuan pemberdayaan.

Dalam implementasi pemberdayaan memiliki strategi agar hasil dari pemberdayaan memenuhi sasaran dan tujuannya. Implementasi dari kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat perlu melalui proses yang matang dan berkelanjutan, untuk itu program yang diberikan perlu ditempatkan pada arah yang benar, yaitu ditujukan pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) yang berintikan kepada pemberian akses dan peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sarana/prasarana (*infrastructure*), pengembangan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pengembangan sistem informasi.

Kemudian, proses pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan tujuannya, sehingga dalam implementasinya dibutuhkan intervensi sosial, yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu intervensi mikro dan intervensi makro (Adi, 2001:32-33). Intervensi mikro

adalah suatu intervensi yang dilakukan pada tingkat individu, keluarga dan kelompok. Sedangkan intervensi makro adalah intervensi yang dilakukan di tingkat komunitas dan organisasi. Dalam praktiknya intervensi makro berhubungan dengan aspek pelayanan masyarakat yang pada dasarnya bukan hal yang bersifat klinis, tetapi lebih memfokuskan pada pendekatan sosial yang lebih luas dalam rangka meningkatkan kehidupan lebih baik bagi masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui proses intervensi makro dalam pengembangan masyarakat dibagi menjadi 2 (dua) pendekatan, di antaranya; (1) pendekatan direktif (*directive approach*) yaitu dilakukan berdasarkan asumsi bahwa *community worker* (pendamping) dari lembaga pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah sehingga mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Peranan *community worker* dalam pendekatan ini bersifat lebih dominan disebabkan prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak dari *community worker*, kemudian mereka yang menetapkan baik dan buruknya suatu program dalam masyarakat, dengan begitu *community worker* dapat mengetahui cara-cara yang dibutuhkan untuk memperbaiki kendala yang dihadapi yang kemudian menyediakan sarana dalam perbaikannya; dan (2) Pendekatan non-direktif (*non-directive approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan berlandaskan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang baik bagi mereka. Dalam pendekatan ini *community worker* lebih bersifat hanya menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat, sedangkan masyarakat merupakan pemeran utama.

Proses pemberdayaan akan berhasil jika melalui peranan *community worker* (pendamping), baik pendampingan melalui lembaga-lembaga pemerintah (*government institutions*) maupun lembaga-lembaga pendapin lain di luar pemerintah (*non-government institutions*). Menurut Adi (1995:62-67) sedikitnya terdapat 7 (tujuh) peranan yang dapat dikembangkan oleh *community worker* (pendamping dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah) diantaranya; pemercepat perubahan (*enabler*), perantara (*broker*), pendidik (*educator*), tenaga ahli (*expert*), perencana sosial (*social planner*), advokat (*advocate*) dan aktivis (*activist*).

Pemberdayaan masyarakat yang diperankan oleh Pemerintah Daerah dan perangkatnya (sebagai *community worker*) dapat melalui kedua proses yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu; (1) Proses pemberdayaan lebih menekankan kepada proses memberikan kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat yang belum berdaya sehingga menjadi lebih berdaya, dengan upaya memfasilitasi aset material guna mendukung pembangunan kemandirian masyarakat; dan (2) Proses yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong maupun memberi motivasi kepada masyarakat di daerah setempat sehingga memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Dalam implementasinya menggunakan strategi yang mengacu pada kebijakan pemberdayaan masyarakat yang telah disusun oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dengan menggunakan pendekatan direktif atau pendekatan non-direktif serta mengutamakan intervensi makro.

Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment atau dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan perkembangan barat, terutama Eropa. *Empowerment* merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan (*power*), serta memiliki asumsi menerima adanya sebuah kekuasaan sebagai faktor dan membuat yang tidak berkuasa menjadi memiliki kekuasaan yaitu yang memiliki *powerless* diberi *power* melalui *empowerment* sehingga menjadi *powerfull* (Pranarka dalam Priyono dan Pranarka, 1996:261-262).

Menurut Jim Ife (1995:182) mengemukakan pemberdayaan memiliki komitmen tinggi terhadap usaha untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menurutnya *empowerment means providing people with the resource, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future and to participate in and affect the life of their community* (yang berarti; pemberdayaan memberikan masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas masyarakat guna menciptakan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam masyarakat). Dari pengertian tersebut pemberdayaan merupakan suatu upaya yang diberikan untuk menggerakkan partisipasi

masyarakat dan memperkuat kemampuan masyarakat yang masih berada dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan dan membutuhkan bantuan atau dorongan untuk berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasi dan demokratisasi.

Pemberdayaan merupakan suatu proses pemberian daya (*power*) berupa kesempatan atau peluang, pengetahuan, keahlian dan materi, sehingga membuat yang tidak berdaya (*powerless*) menjadi memiliki kekuasaan (*powerfull*) atau membantu meningkatkan kemampuan, kapasitas dan rasa percaya diri masyarakat sehingga memiliki daya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat menentukan masa depan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam hal ini juga memiliki peranan dalam meningkatkan kemampuan, kapasitas dan rasa percaya diri masyarakat sehingga kemudian memiliki daya/kekuatan untuk mengatasi permasalahan yang kemudian dihadapi dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya/kekuatan yang dimiliki masyarakat sehingga kemudian mampu mandiri dan berdaya.

Menurut Sumodiningrat (2000:109) tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu; (1) meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat bawah dan menurunkan jumlah penduduknya yang terdapat di bawah garis kemiskinan; (2) berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif masyarakat di pedesaan; dan (3) berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat baik aparat maupun warga. Berkaitan dengan tujuan dari pemberdayaan, Moeljarto (1996:132) menyatakan bahwa masyarakat miskin dianggap berdaya apabila mampu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia peningkatan kemampuan pemodal, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi.

Midgley (1995:103-138) mengatakan ada 3 (tiga) strategi besar dalam pembangunan sosial, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembangunan sosial melalui individu (*social development by individuals*) yang mana setiap individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah kepada pendekatan individual atau perusahaan (*individuals or enterprise approach*);
2. Pembangunan sosial melalui komunitas (*social development by communities*) yang mana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*); dan
3. Pembangunan sosial melalui pemerintah (*social development by governments*) yang mana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*governmental agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*).

Oleh karena itu, tidak hanya individu dan komunitas yang melakukan pemberdayaan melainkan juga diperankan oleh pemerintah. Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, karena melalui upaya, bantuan dan intervensi pemerintah diharapkan masyarakat akan semakin berdaya yang kemudian pada gilirannya menjadi *powerfull*. Sedangkan dalam konteks pembiayaan program, tentu bantuan pemerintah merupakan suatu upaya yang baik dari pemerintah dalam memberikan daya (baik itu berupa modal, peluang, pengetahuan dan keahlian) kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan, kapasitas dan rasa percaya diri mereka, agar mampu mengatasi masalah kemiskinan yang sedang dihadapi tentunya serta mencapai kehidupan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagaimana menurut Moleong (2006:3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya.

Dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat mengembangkan permasalahan-permasalahan pada situasi dan kondisi secara alami serta hasil penelitian yang didapat dapat dijabarkan secara terperinci untuk mendapatkan kebenaran dalam bentuk data empiris lapangan. Serta penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian mengenai bagaimana peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memberikan program subsidi bibit sapi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah banyak ditemukan berbagai macam pendapat yang memberikan rumusan dari berbagai sudut pandang yang bervariasi tentunya. Peranan sendiri berasal dari kata peran yang berarti laku, hal berlaku/bertindak, pemeran, pelaku, pemain sedangkan peranan (*role*) adalah fungsi, kedudukan, bagian kependudukan (Dahlan,1994:501). Kota Palangka Raya tentu berbeda dengan kota-kota lainnya salah satunya dalam potensi pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat dilihat dari sisi geografis Kota Palangka Raya terletak di tengah pulau yang tentu tidak memiliki pendapatan dari laut. Potensi dari sektor peternakan tentunya harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya. Tujuannya sudah jelas sebagaimana tertuang dalam rencana strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya sehingga pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan dan berkontribusi dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian.

Dapat dilihat dari tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya berfokus kepada peningkatan kualitas mutu dan ketahanan pangan Kota Palangka Raya. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya dituntut untuk dapat mengelola dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat ekonomi cerdas (*smart economy*). Untuk mewujudkan masyarakat ekonomi cerdas dalam hal ini

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, pembinaan yang dilakukan.

Masyarakat tergabung ke dalam beberapa Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani yang berada dibawah koordinasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya. Dibawah ini merupakan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sampai tahun 2020.

Dari hasil wawancara diatas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya memiliki wewenang untuk melakukan pengembangan ekonomi masyarakat dalam hal ini melalui program pemberian subsidi bibit sapi, sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada. Selain itu secara tidak langsung meningkatkan kualitas sumber daya dan pengembangan potensi lain karena dalam melakukan aktivitasnya berkoordinasi langsung dengan pemerintah. Pemerintah merupakan suatu pengorganisasian yang disiapkan untuk mewujudkan tujuan tertentu dengan hal-hal yang memberikan keterangan untuk kepentingan-kepentingan umum kemasyarakatan. Pemerintah merupakan suatu anggota yang paling umum, diantaranya : (a) Memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya; dan (b) Monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan (Inu Kencana, 2011:8-12). Program pembagian bibit sapi ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ekonomi cerdas (*smart economy*). Selain itu juga sebagai upaya menumbuhkan kemandirian pada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan sumber daya.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya memiliki tugas pokok untuk pengembangan lingkup tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, perbibitan dan produksi ternak serta ketahanan pangan.

Perumusan dan koordinasi memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya, tentunya agar kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat secara bersama dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan pertanian. Fungsi tersebut saling berkaitan dan terikat keduanya harus bekerja secara bersinergi

sehingga dapat berjalan dengan baik. Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.

Program pemberian bibit sapi merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi sumber daya masyarakat melalui langkah-langkah yang terukur dan strategis. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usaha. Potensi pengembangan melalui pemberian bibit sapi ini merupakan langkah untuk mengembangkan pada sektor peternakan guna memberikan bibit unggul. Pemberian bibit ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sapi dalam rangka menjaga ketersediaan bahan baku untuk pertumbuhan ternak. Tentunya pemberian bibit sapi terbaik memberikan kualitas ternak yang baik pula serta kecocokan dengan kondisi geografis Kota Palangka Raya.

Pembinaan dan pengembangan tentunya akan membuka peluang usaha dan pendapatan masyarakat, iklim usaha yang kondusif, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana peternakan. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memberikan program pembinaan dan pengawasan sehingga masyarakat dan pemerintah dapat berkoordinasi dengan baik. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika.

Pembangunan sosial melalui pemerintah (*social development by governments*) yang mana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*governmental agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*). Dalam melaksanakan peranannya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentu memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan program subsidi sapi. Faktor-faktor ini tentu terdiri dari faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam jalannya program ini agar mencapai tujuannya yaitu peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah.

Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, karena melalui upaya, bantuan dan intervensi pemerintah diharapkan masyarakat akan semakin berdaya yang kemudian pada gilirannya menjadi *powerfull*. Salah satunya dengan meningkatkan produktifitas masyarakat dengan adanya sinergi antara masyarakat dengan elemen pemerintah menjadi faktor pendukung upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sinergitas keduanya diperlukan dalam pelaksanaan program agar terjalin hubungan kerjasama internal yang produktif serta hubungan kemitraan yang harmonis di antara keduanya, serta menghasilkan produk yang berkualitas.

Adanya sinergitas tentu mempengaruhi perilaku masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam melakukan koordinasi, sikap, opini maupun tindakan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya untuk menjaga sinergitas dengan masyarakat dengan melakukan pengawasan dan pemberdayaan secara berkesinambungan.

Koordinasi yang baik tentu akan menghasilkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam mengelola bibit sapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga memfasilitasi keluhan terkait kesehatan dan kondisi sapi sehingga dapat diketahui tingkat kesehatannya. Hal ini memiliki kecenderungan sekunder yang lebih menekankan kepada proses menstimulasi, mendorong maupun memberi motivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan tujuan pemberdayaan.

Pengawasan kesehatan ternak tentu harus dilakukan dengan baik dan rutin mengingat kondisi iklim di Kota Palangka Raya yang tidak menentu. Tingkat kesehatan yang baik tentu meningkatkan pertumbuhan daya jual sapi tersebut. Pengawasan yang baik akan meningkatkan kualitas sapi yang baik pula sehingga daya jual dan pemenuhan kebutuhan daging dapat terpenuhi. Semakin baik upaya yang dilakukan tentu akan meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat dan daerah. Dalam penerapan pemberdayaan memiliki strategi agar hasil dari pemberdayaan memenuhi sasaran dan tujuannya yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Implementasi dari kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat perlu melalui proses yang matang dan berkelanjutan, untuk itu program yang diberikan perlu ditempatkan pada arah yang benar, yaitu ditujuan pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) yang berintikan kepada pemberian akses dan peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan ekonomi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sarana/prasarana (*infrastructure*), pengembangan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pengembangan sistem informasi. Partisipasi dan peranan masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan dengan memberikan masukan pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, serta materi untuk tercapainya tujuan dari program subsidi sapi.

Dalam pelaksanaan program subsidi bibit sapi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka tentu mengharapkan hasil yang maksimal dan dapat menumbuh kembangkan perekonomian di dalam masyarakat. Namun dalam penerapannya tentu ada kendala yang mempengaruhi pelaksanaan maupun hasil dari program yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Faktor-faktor ini yang dapat menghambat jalannya program agar mencapai tujuannya yaitu peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah.

Berkaitan dengan tujuan dari pemberdayaan, Moeljarto (1996:132) menyatakan bahwa masyarakat miskin dianggap berdaya apabila mampi meningkatkan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia peningkatan kemampuan pemodal, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan usaha bersama dengan menerapkan prinsip gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. Kualitas sumber daya manusia merupakan sumber daya yang harus memenuhi kriteria pengetahuan dan keterampilan. Manusia merupakan pelaku, pelaksana sehingga diharuskan berperan aktif dalam pelaksana pembangunan. Kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat menuntut manusia untuk dapat mengolah informasi dan mendayagunakan teknologi, sehingga dapat mengefisienkan produktivitas sehari-hari.

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan berhasilnya program pemberdayaan yang dilakukan. Dengan sumber daya yang kurang tentu tidak mudah untuk dapat bersaing dan berkembang, oleh karena itu kualitas sumber daya

manusia sangat berpengaruh. Berkembangnya kapasitas sumber daya masyarakat tentu sejalan dengan meningkatnya kegiatan sosial ekonomi di dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian dilapangan dapat menggambarkan bahwa kualitas pengetahuan dalam penangan budidaya masih terbilang kurang. Terbatasnya pengetahuan dan minimnya akses terhadap perkembangan teknologi yang menjadi penghambat perkembangan pengetahuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perkembangan pengetahuan teknologi harus sejalan dengan peningkatan sumber daya manusia agar peternak sapi dapat bekerja lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya.

Selain itu, perubahan cuaca di Kota Palangka Raya yang tidak menentu merupakan masalah lain di dalam pelaksanaan program subsidi sapi. Iklim yang berubah berdampak kepada suhu rata-rata global, perubahan curah hujan, kenaikan suhu, serta kejadian-kejadian alam lainnya seperti banjir, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Dampak perubahan iklim ini tentu berdampak kepada kondisi sapi yang dapat mengubah perilaku dan pertumbuhan, kemampuan reproduksi, serta produktivitas hingga kematian.

Kondisi iklim yang terus berubah tentu menjadi masalah serius dalam keberlangsungan peternakan yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca atau iklim. Cuaca yang tidak menentu dapat menjadi penghambat dalam program ternak sapi. Hal ini ditandai dengan adanya sapi yang terkena penyakit bahkan mati, yang tentunya berdampak kepada hasil perekonomian.

Pelaksanaan program peternak sapi bekerja sama dengan pemerintah untuk mengantisipasi iklim yang mengancam kesehatan ternak. Cuaca yang panas disebabkan kemarau yang berkepanjangan akan berpengaruh kepada kondisi ternak sehingga mudah terkena penyakit. Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar dapat memberikan solusi terhadap perubahan iklim yang dihadapi serta dengan menyediakan obat-obatan ternak. Perubahan iklim ini secara berkesinambungan memperburuk kondisi perekonomian masyarakat dan daerah secara jangka panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian serta pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memberikan subsidi bibit sapi di Kelurahan Kalampangan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari : (1) Mengelola dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat ekonomi cerdas (*smart economy*) melalui program pemberian subsidi bibit sapi, sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada; (2) Pengembangan lingkup tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, perbibitan dan produksi ternak serta ketahanan pangan; dan (3) Optimalisasi yang dilakukan secara terpusat, sehingga kemudian dapat memenuhi kebutuhan ternak dan pendapatan masyarakat maupun daerah.
2. Hal yang mendukung dan menghambat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memberikan subsidi bibit sapi, yaitu; (1) Yang menjadi faktor mendukung sinergitas antara masyarakat dan pemerintah berjalan dengan baik; dan (2) Faktor menghambat yaitu; *Pertama*, kualitas sumber daya manusia yang cukup rendah dalam hal pengetahuan teknologi; *Kedua*, cuaca yang tidak menentu menjadi hal yang dapat merusak kelangsungan hidup sapi bahkan hingga kematian.

REFERENSI

- Adi, IR. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Al, Barry Dahlan. 1994. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Yogyakarta, Arkola.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Rhama, B., & Setiawan, F. (2020). Assessing Public Private Partnership in Indonesia Tourism. *Policy & Governance Review*, 4(3), 197-209.
- Hamdi, Muchlis., 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*, Bandung: Yarsif Watampone.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Anaysis and Practice*. Australia, Longman.
- Midgley, James. 1995. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London, SAGE Publication Ltd.

- Miftah, Thoha. 2005. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta, UIP.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta, Prenada Media Group
- Pranarka, dan Vidyandika Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment), Penyunting: Onny S. Prijono dan Pranarka, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta, CSIS.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, F. (2019). Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke-3 dalam Teori Modernisasi terhadap Administrasi Pembangunan di Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 8(2), 1-11.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Press.
- Sumihardjo, Tumar. 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung, Puskomedia.
- Sutopo, HB. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta, Universitas Sebelas Maret Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Verawati, Tuti A. 2003. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*. Makassar, Universitas 45 Makassar.